

Ultra-Poor Graduation Model: Evaluasi Implementasi Program di Indonesia

Rusdi Hamka Lubis

Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Cilandak Jakarta Selatan
rusdihamka@ptiq.ac.id

Abstract

The Extreme poverty remains a major challenge in Indonesia's socio-economic development. One innovative approach implemented to address this issue is the Ultra-Poor Graduation Model (UPGM). This model is designed as a phased intervention to help extremely poor households achieve economic self-sufficiency through six key components: participant targeting, consumption support, productive asset transfer, skills training, intensive coaching, and access to financial services. This study evaluates the implementation of UPGM in Indonesia by examining adapted programs such as the Graduation Program under PKH (Conditional Cash Transfer Program) and empowerment initiatives by non-governmental organizations (NGOs), including Rumah Zakat and PKPU Human Initiative. The evaluation results indicate increases in income, ownership of productive assets, and positive changes in participants' consumption patterns. However, several challenges remain, such as accurate targeting of beneficiaries, limited human resources for coaching, and the risk of participants falling back into poverty after the program ends. Comparisons with UPGM implementation in Bangladesh and Ethiopia highlight the importance of intensive mentoring, integration with social protection programs, and market access to ensure long-term program sustainability. Therefore, strengthening policies, continuous monitoring, and cross-sector collaboration are essential for optimizing UPGM as a strategy to eradicate extreme poverty in Indonesia.

Keywords: Poverty; Graduation; Empowerment; Coaching; Inclusion

Abstrak

Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Salah satu pendekatan inovatif yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah Ultra-Poor Graduation Model (UPGM). Model ini dirancang sebagai intervensi bertahap untuk membantu rumah tangga miskin ekstrem agar dapat mandiri secara ekonomi melalui enam komponen utama, yaitu identifikasi peserta, bantuan konsumsi, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, pendampingan intensif, serta akses terhadap layanan keuangan. Studi ini mengevaluasi implementasi UPGM di Indonesia dengan meninjau program-program adaptasi, seperti Program Graduasi PKH dan model pemberdayaan oleh lembaga swadaya masyarakat, termasuk Rumah Zakat dan PKPU Human Initiative. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, kepemilikan aset produktif, serta perubahan positif dalam pola konsumsi peserta program. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketepatan sasaran peserta, keterbatasan sumber daya pendamping, serta risiko kemiskinan kembali pasca program. Perbandingan dengan implementasi UPGM di Bangladesh dan Ethiopia menunjukkan pentingnya kualitas pendampingan, integrasi program perlindungan sosial, dan akses pasar untuk memastikan keberlanjutan hasil program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, monitoring berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UPGM dapat berfungsi optimal sebagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan, Pendampingan, Inklusi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan dalam dua dekade terakhir, kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ultra poor atau sangat miskin masih belum sepenuhnya terjangkau oleh intervensi pembangunan (Tambe 2022). Mereka tidak hanya mengalami keterbatasan pendapatan, tetapi juga mengalami kerentanan multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, keterisolasian sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar (World-Bank 2020).

Selama ini, berbagai kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah diluncurkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin (Fitrinitia dan Matsuyuki 2023). Namun, banyak dari program tersebut bersifat safety net atau jaring pengaman, yang belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan graduation model menjadi relevan karena bertujuan tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mengarahkan peserta untuk keluar dari kemiskinan secara permanen (Hashemi & de Montesquiou, 2011).

Ultra-Poor Graduation Model (UPGM) adalah pendekatan terintegrasi yang pertama kali dikembangkan oleh BRAC di Bangladesh pada awal tahun 2000-an. Model ini mencakup intervensi multidimensi yang terdiri atas bantuan konsumsi jangka pendek, pelatihan keterampilan, pemberian aset produktif, pendampingan intensif, serta akses terhadap tabungan dan layanan keuangan (Banerjee dkk. 2015). Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kelompok paling miskin dapat “naik kelas” menuju kemandirian ekonomi dalam jangka menengah.

Model ini telah diadopsi dan dimodifikasi di lebih dari 40 negara, dengan hasil yang cukup menjanjikan. Studi-studi di berbagai negara menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan pendapatan, konsumsi, serta kesejahteraan psikososial peserta program, bahkan setelah lima tahun pasca intervensi (Banerjee et al., 2015; Roelen et al., 2017). Di Indonesia, pendekatan ini mulai dikenalkan melalui sejumlah inisiatif oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Rumah Zakat dan Yayasan Cipta, serta melalui uji coba terbatas oleh Kementerian Sosial dan mitra pembangunan internasional.

Namun, implementasi UPGM di Indonesia masih relatif baru dan belum banyak dikaji secara sistematis. Tantangan utama dalam replikasi model ini mencakup kesesuaian konteks lokal, keberlanjutan pendanaan, kualitas pendampingan, serta sinergi dengan program pemerintah yang sudah ada. Selain itu, belum banyak data empiris yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari program ini terhadap kelompok sasaran di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Sulawesi (Uddin dan Lawson 2025).

Permasalahan penting yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana UPGM mampu mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia yang bersifat multidimensi dan lintas generasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini tidak hanya penting untuk mengukur efektivitasnya, tetapi juga untuk menyusun strategi perluasan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi praktik baik dan hambatan dalam implementasi yang dapat dijadikan bahan perbaikan bagi pelaku kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Ultra-Poor Graduation

Model di Indonesia, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Fokus evaluasi mencakup analisis komponen program, capaian yang diraih, serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi kelompok sangat miskin.

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen program, dan tinjauan terhadap laporan-laporan hasil implementasi UPGM di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap kompleksitas program serta konteks pelaksanaannya yang sangat bergantung pada faktor sosial dan kelembagaan lokal.

Konsep Teoretis dan Tinjauan Literatur

Kemiskinan ekstrem merupakan bentuk kemiskinan paling parah yang menggambarkan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi individu yang hidup dengan penghasilan di bawah US\$2,15 per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) internasional (Khan dkk. 2024). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk menetapkan garis kemiskinan, yakni gabungan dari kebutuhan makanan minimal sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan (BPS 2023). Selain itu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pendekatan multidimensi melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) guna menangkap aspek kemiskinan yang bersifat non-moneter (Bappenas 2023).

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem adalah Ultra-Poor Graduation Model (UPGM). Model ini

merupakan strategi intervensi terpadu yang dirancang untuk membawa masyarakat yang sangat miskin menuju kemandirian ekonomi. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh BRAC di Bangladesh pada awal tahun 2000-an dan telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan (Hashemi dan Umaira 2011). UPGM dirancang untuk dijalankan selama 24 hingga 36 bulan, dengan pendekatan bertahap dan sistematis untuk membangun kapasitas ekonomi serta ketahanan sosial peserta.

Ultra-Poor Graduation Model terdiri dari enam komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen pertama adalah identifikasi peserta secara tepat melalui mekanisme partisipatif atau survei berbasis komunitas agar program benar-benar menysasar kelompok termiskin (Banerjee et al., 2015). Selanjutnya adalah dukungan konsumsi berupa bantuan tunai atau pangan untuk memastikan kebutuhan pokok terpenuhi selama fase awal program (Uddin dan Lawson 2025). Bantuan ini penting agar peserta dapat fokus mengikuti pelatihan dan memulai usaha produktif tanpa terbebani oleh kekurangan pangan harian.

Komponen ketiga adalah pemberian aset produktif yang dapat menjadi sumber penghasilan, seperti ternak, alat pertanian, atau modal usaha kecil (Loewe dan Schüring 2021). Untuk mendukung pengelolaan aset tersebut, peserta juga diberikan pelatihan keterampilan yang relevan sesuai jenis usaha yang akan dijalankan (Hulme dan Krishnan 2021). Pelatihan ini mencakup aspek teknis produksi, pengelolaan keuangan sederhana, hingga pemasaran produk agar usaha yang dirintis memiliki daya saing.

Agar program berjalan efektif, peserta juga memperoleh pendampingan intensif melalui kunjungan rutin oleh mentor atau fasilitator program (Hashemi & Umaira, 2011). Pendampingan ini berfungsi untuk membangun motivasi, menyelesaikan hambatan, dan memastikan bahwa peserta mengikuti tahapan program dengan baik. Selain itu, peserta diarahkan untuk memiliki akses

terhadap tabungan dan layanan keuangan formal, sebagai langkah persiapan untuk integrasi ke sistem ekonomi formal jangka panjang (Banerjee et al., 2015).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan *graduation* ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Penelitian oleh Banerjee et al. (2015) terhadap implementasi program ini di enam negara membuktikan bahwa pendekatan UPGM mampu meningkatkan pendapatan, kepemilikan aset, tabungan, dan kondisi psikologis peserta secara signifikan. Model yang diterapkan oleh BRAC di Bangladesh bahkan berhasil mengentaskan lebih dari 95% pesertanya dari kemiskinan ekstrem, menjadikannya sebagai rujukan internasional dalam program pemberdayaan masyarakat miskin (Hashemi & Umaira, 2011).

Keberhasilan serupa juga ditemukan di beberapa negara berkembang lain, seperti Ethiopia dan Ghana, meskipun terdapat variasi hasil tergantung pada kondisi sosial dan kebijakan setempat (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015). Namun, tidak semua implementasi berhasil sepenuhnya. Faktor seperti kualitas pendampingan, keberlanjutan bantuan, dan kesiapan lembaga pelaksana menjadi penentu utama efektivitas program di berbagai konteks (Hulme, 2010).

Di Indonesia, pendekatan model *graduation* mulai diuji coba oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (NGO) seperti Islamic Relief Indonesia (Rohman 2025), PKPU Human Initiative dan Rumah Zakat (Amalia, 2019). Studi awal menunjukkan bahwa model ini berpotensi besar untuk diterapkan, khususnya di daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi antara lain menyangkut koordinasi antar-lembaga, konsistensi pendampingan, serta keterbatasan kapasitas pelaksana di tingkat lokal (Amalia, 2019; Bappenas, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem kelembagaan dan sinergi lintas sektor

agar implementasi UPGM dapat optimal dan berkelanjutan.

Implementasi Ultra-Poor Graduation Model di Indonesia

Implementasi *Ultra-Poor Graduation Model (UPGM)* di Indonesia mulai mendapatkan perhatian dalam satu dekade terakhir sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Beberapa program telah mengadaptasi model ini, salah satunya adalah Program Graduasi yang merupakan bagian dari skema Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat PKH agar secara bertahap mampu mandiri secara ekonomi dan akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) juga menerapkan model ini secara lebih spesifik, seperti Yayasan Rumah Zakat melalui program *Desa Berdaya*, serta PKPU Human Initiative yang berfokus pada pemberdayaan ultra miskin melalui bantuan aset dan pendampingan intensif (Amalia, 2019).

Selain lembaga nasional, model UPGM juga diadopsi oleh lembaga internasional, seperti BRAC yang telah melakukan kolaborasi dengan beberapa NGO lokal untuk berbagi pengalaman penerapan model graduasi dari Bangladesh. Beberapa program juga melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Bentuk kolaborasi lainnya dilakukan bersama lembaga donor internasional seperti UNDP dan ADB, yang mendorong integrasi UPGM dengan kebijakan nasional, termasuk agenda penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan selesai pada 2024 (Bappenas, 2023).

Strategi pelaksanaan UPGM di Indonesia secara umum mengikuti enam tahapan utama sesuai kerangka internasional. Kelompok sasaran utama dari program ini adalah rumah tangga miskin ekstrem, terutama mereka yang

belum terjangkau oleh program perlindungan sosial lainnya. Mekanisme penyaluran bantuan dimulai dari pemberian konsumsi dasar, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan intensif oleh fasilitator lokal. Salah satu keunggulan implementasi di Indonesia adalah integrasi dengan program perlindungan sosial nasional seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan JKN-KIS, sehingga peserta UPGM memiliki akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial (Amalia, 2019; Bappenas, 2023).

Meski demikian, implementasi UPGM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satunya adalah proses identifikasi peserta yang sering kali belum tepat sasaran, sehingga ada kemungkinan peserta yang bukan kategori miskin ekstrem ikut mendapatkan manfaat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah dan kapasitas pendamping di lapangan, menjadi hambatan utama dalam menjamin keberhasilan program. Keterbatasan anggaran program juga berdampak pada variasi kualitas pelaksanaan antar daerah (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015).

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah memastikan ketahanan ekonomi peserta pasca program. Banyak peserta yang mengalami peningkatan pendapatan sementara, namun belum memiliki ketahanan menghadapi risiko ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau bencana alam. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap lembaga keuangan formal, peningkatan kapasitas wirausaha, serta pengembangan jaringan pasar menjadi langkah strategis agar keberhasilan program tidak bersifat sementara. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten diperlukan agar implementasi UPGM di Indonesia benar-benar mampu memutus mata rantai kemiskinan ekstrem secara permanen (Banerjee et al., 2015).

Evaluasi dan Analisis

Evaluasi terhadap implementasi Ultra-Poor Graduation Model (UPGM) di Indonesia menunjukkan adanya capaian positif, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan dan aset peserta program. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga, peserta program mengalami peningkatan kepemilikan aset produktif, seperti ternak atau usaha kecil, yang sebelumnya tidak dimiliki. Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam pola konsumsi, terutama terkait kecukupan pangan harian, serta meningkatnya akses peserta terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak-anaknya (Amalia, 2019). Beberapa peserta bahkan mulai memiliki tabungan dan akses terhadap lembaga keuangan formal, meskipun skalanya masih terbatas.

Di sisi lain, tingkat kemandirian ekonomi peserta pasca program masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun ada peningkatan pendapatan, namun keberlanjutan usaha yang dirintis masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan faktor eksternal lainnya. Peserta yang memiliki akses pendampingan berkualitas dan jejaring usaha cenderung lebih berhasil mempertahankan kemandiriannya. Namun, sebagian lainnya tetap mengalami kesulitan untuk keluar sepenuhnya dari siklus kemiskinan, khususnya di daerah dengan infrastruktur dan akses pasar yang terbatas (Bappenas, 2023).

Aspek kegagalan atau keterbatasan implementasi juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satu temuan penting adalah fenomena kemiskinan kembali (relapse) setelah program berakhir. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya mekanisme perlindungan ekonomi jangka panjang serta keterbatasan modal lanjutan untuk pengembangan usaha. Selain itu, tidak sedikit peserta yang mengalami ketergantungan bantuan tanpa diikuti perkembangan signifikan dalam aspek produktivitas. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kegagalan adalah kesenjangan antara desain program dan implementasi di lapangan, seperti ketidakcocokan aset

produktif dengan potensi lokal atau lemahnya kualitas pendamping (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015).

Jika dibandingkan dengan implementasi di negara lain, Indonesia dapat belajar banyak dari keberhasilan BRAC di Bangladesh yang menempatkan pendamping intensif sebagai kunci sukses program. Pendamping BRAC tidak hanya memantau perkembangan usaha, tetapi juga berperan sebagai mentor yang membangun motivasi dan kedisiplinan peserta (Hashemi & Umaira, 2011). Di Ethiopia, pendekatan yang mengintegrasikan UPGM dengan sistem perlindungan sosial nasional menunjukkan hasil positif dalam hal keberlanjutan pendapatan peserta (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015). Indonesia dapat mengambil pelajaran penting terkait pentingnya kesinambungan program, kualitas pendampingan, dan integrasi lintas program perlindungan sosial untuk memperkuat dampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, evaluasi implementasi UPGM di Indonesia menunjukkan bahwa model ini memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, kapasitas pendamping, serta komitmen kebijakan pemerintah. Agar program ini optimal, perlu ada perbaikan menyeluruh mulai dari tahap targeting, mekanisme pemberdayaan, hingga strategi pasca program untuk memastikan peserta tidak kembali jatuh miskin. Dengan belajar dari pengalaman internasional dan memperkuat kolaborasi multi-sektor, Indonesia dapat mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan (Banerjee et al., 2015).

Rekomendasi Kebijakan

Agar implementasi Ultra-Poor Graduation Model (UPGM) di Indonesia lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan sejumlah langkah strategis berbasis kebijakan. Pertama, penting untuk melakukan penguatan mekanisme

identifikasi dan seleksi peserta agar program benar-benar menyasar rumah tangga yang tergolong miskin ekstrem. Proses seleksi sebaiknya tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memanfaatkan metode partisipatif berbasis komunitas lokal serta memadukan dengan data dari program perlindungan sosial lainnya, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Selanjutnya, penguatan kualitas pendampingan menjadi elemen kunci. Perlu disiapkan program pelatihan intensif bagi para pendamping agar tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mentor dan fasilitator pemberdayaan. Selain itu, peserta program harus didorong untuk mendapatkan akses terhadap jaringan pasar yang lebih luas, baik melalui kolaborasi dengan koperasi lokal, platform digital, maupun jaringan usaha milik swasta. Kemudahan akses terhadap pasar menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan usaha produktif yang dirintis oleh peserta UPGM.

Selain aspek pendampingan, program UPGM harus diintegrasikan secara optimal dengan program perlindungan sosial nasional. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dukungan, seperti menghubungkan peserta UPGM dengan manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pendekatan integratif ini akan memperkuat daya tahan ekonomi peserta terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masa depan.

Agar program UPGM berjalan sesuai sasaran, diperlukan monitoring dan evaluasi (M&E) yang berkelanjutan. Proses evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir program, melainkan sejak awal hingga pasca-program untuk memantau perkembangan jangka panjang peserta. Penggunaan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan evaluasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat pengambilan keputusan

kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Terakhir, kunci keberhasilan implementasi UPGM adalah kolaborasi multipihak. Pemerintah, NGO, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga keuangan harus bersinergi dalam satu kerangka kebijakan pemberdayaan kemiskinan ekstrem. Peran sektor swasta dan lembaga keuangan dapat didorong dalam bentuk pembukaan akses kredit mikro, dukungan pasar, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen lintas sektor, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia akan lebih realistis untuk dicapai secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Ultra-Poor Graduation Model (UPGM) merupakan salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan. Di Indonesia, implementasi model ini menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan, aset, dan akses layanan dasar peserta program. Meski demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, integrasi dengan program perlindungan sosial nasional, serta dukungan kelembagaan yang kuat. Pembelajaran dari negara-negara lain seperti Bangladesh dan Ethiopia menunjukkan bahwa kunci sukses program terletak pada pendampingan intensif, akses pasar yang terbuka, serta dukungan kebijakan yang konsisten.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan mencegah kemiskinan kembali (relapse), perlu ada sinergi kuat antara pemerintah, NGO, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Integrasi lintas program perlindungan sosial dan penguatan kapasitas pendamping menjadi prioritas yang harus segera dilakukan. Dengan langkah strategis tersebut, UPGM berpotensi besar menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target nasional

penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Banerjee, Abhijit, Esther Duflo, Nathanael Goldberg, Dean Karlan, Robert Osei, William Parienté, Jeremy Shapiro, Bram Thuysbaert, dan Christopher Udry. 2015. "A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries." *Science* 348(6236). doi:10.1126/science.1260799.
- Bappenas. 2023. *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023–2024*. Jakarta.
- BPS. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta.
- Fitritinitia, Irene Sondang, dan Mihoko Matsuyuki. 2023. "Social protection for climate-disasters: A case study of the program Keluarga Harapan cash transfer program for smallholder farm household in Indonesia." *Progress in Disaster Science* 17: 100278. doi:10.1016/j.pdisas.2023.100278.
- Hashemi, S, dan W Umaira. 2011. *Graduation pathways: Increasing income and assets*. Dhaka .
- Hulme, David, dan Aarti Krishnan. 2021. *The global governance of poverty and inequality." Global Governance Futures*. .
- Khan, Navid, Ke Xing, Salman Mahmood, dan Riaz Ahmad. 2024. "Key underlying concepts of shared prosperity: insights from a literature review." *International Review of Economics* 71(3): 727–51. doi:10.1007/s12232-024-00464-9.
- Loewe, Markus, dan Esther Schüring. 2021. "Introduction to the Handbook on Social Protection Systems." Dalam *Handbook on Social Protection Systems*, Edward Elgar Publishing.

doi:10.4337/9781839109119.00011

Rohman, Fatkur. 2025. "Islamic Relief dan LAZ Harfa Luncurkan Program Islamic Ultra Poor Graduation untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Pandeglang." *BeritaUnggulan.Com*.

Tambe, Sandeep. 2022. "Graduation Approach for the Ultra-poor." Dalam , 95–107. doi:10.1007/978-3-030-90491-3_8.

Uddin, Md Moslah, dan David Lawson. 2025. "Creating social capital for the poorest women – evidence from BRAC's Ultra Poor Graduation program." *Development in Practice* 35(4): 633–49. doi:10.1080/09614524.2025.2495967.

World-Bank. 2020. *Global waves of debt: Causes and consequences*. Washington DC: World Bank.

Lampiran



Gambar 1: Ultra-Poor Graduatın Model

Tabel 1: Matriks Ultra-Poor Graduation Model

No.	Komponen UPGM	Tujuan	Strategi Pelaksanaan	Tantangan Implementasi
1	Identifikasi Peserta	Menentukan sasaran kelompok miskin ekstrem	Survei partisipatif, community-based targeting, <i>proxy means test</i>	Data tidak akurat, risiko inclusion/exclusion error
2	Bantuan Konsumsi	Memenuhi kebutuhan dasar agar peserta fokus berusaha	Bantuan tunai/pangan selama tahap awal	Ketergantungan bantuan
3	Aset Produktif	Memberikan sumber penghasilan jangka panjang	Bantuan ternak, alat usaha, modal usaha mikro	Ketidakcocokan aset dengan potensi lokal
4	Pelatihan Keterampilan	Meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha	Pelatihan teknis, pengelolaan usaha, pemasaran	Keterbatasan SDM dan sarana pelatihan
5	Pendampingan Intensif	Membantu implementasi program secara efektif	Pendamping lapangan secara rutin	Jumlah dan kualitas pendamping kurang
6	Akses Layanan Keuangan	Mendorong inklusi keuangan dan keberlanjutan usaha	Membuka rekening tabungan, akses kredit mikro	Literasi keuangan rendah, akses lembaga keuangan

Tabel 2: Tahapan Pelaksanaan UPGM

Tahapan	Kegiatan Utama	Yang Harus Dipersiapkan
1. Identifikasi Peserta	- Pendataan rumah tangga miskin ekstrem	- Data kemiskinan lokal (DTKS)
	- Verifikasi dan validasi data	- Alat survei & instrumen penilaian
		- Tim enumerator
2. Bantuan Konsumsi Awal		- Dana bantuan konsumsi

Ultra-Poor Graduation Model: Evaluasi Implementasi Program di Indonesia
Rusdi Hamka Lubis

Tahapan	Kegiatan Utama	Yang Harus Dipersiapkan
	- Pemberian bantuan pangan/tunai untuk kebutuhan dasar	- Mekanisme penyaluran (transfer bank/kupon pangan)
3. Pemberian Aset Produktif	- Penyaluran aset usaha (ternak, alat usaha, modal usaha)	- Penentuan jenis aset sesuai potensi lokal
		- Kerjasama dengan penyedia aset
4. Pelatihan Keterampilan	- Pelatihan teknis sesuai jenis usaha	- Modul pelatihan
	- Pelatihan pengelolaan usaha	- Fasilitator/pelatih ahli
		- Sarana prasarana pelatihan
5. Pendampingan Intensif	- Kunjungan rutin oleh pendamping lapangan	- Rekrutmen & pelatihan pendamping
	- Monitoring perkembangan usaha	- Jadwal pendampingan
		- Form monitoring
6. Akses Keuangan	- Membuka rekening tabungan	- Kerjasama dengan bank/lembaga keuangan mikro
	- Pengenalan ke lembaga keuangan	- Edukasi literasi keuangan
7. Graduasi (Kelulusan)	- Evaluasi akhir peserta	- Instrumen evaluasi akhir
	- Deklarasi kemandirian	- Rencana tindak lanjut pasca-graduasi